

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2018

5.1.1 Strategi Kampanye Politik Berbasis Identitas

Strategi politik merujuk pada metode yang diterapkan untuk mewujudkan cita-cita politik, contohnya meliputi penerapan regulasi baru, pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan tindakan seperti deregulasi, privatisasi, atau desentralisasi. Kepentingan strategi politik tidak hanya muncul dalam konteks partai politik dan pemerintah, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang memiliki peran aktif dalam dunia politik (Peter, 2004). Maka dari itu, strategi politik merujuk pada ilmu yang membahas teknik, taktik, cara, dan kiat yang dikelola oleh politisi untuk memperoleh dan menjaga sumber kekuasaan, serta merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan (Ramlan, 1992).

Faktor yang paling krusial dalam politik etnis adalah keberadaan identitas etnis, karena politik ini dikembangkan berdasarkan identitas tersebut dan cenderung bersifat eksklusif (Xia et al., 2018). Di tingkat daerah, para pemilih lebih merasakan dampak dari pilihan suara mereka dalam pemilihan dibandingkan dengan pemilihan di tingkat nasional (Zulfan, 2012).

Dalam pemilihan kepala daerah Kalimantan Barat pada Tahun 2018, peta politik mengalami keunikannya sendiri yang terdiri dari pasangan calon yang ketiganya sebagai calon tunggal (*single pair*) dari setiap etnis, tidak pada pasangan Milton Crosby – Boyman Harun yang menggabungkan dua etnik dalam pemilihannya. Eksistensi dari perwakilan etnik pada Pilgub di Tahun 2018 di setiap pasangan menyebabkan situasi perolehan suara di kabupaten pesisir menjadi terfragmentasi dan tidak maksimal. Di sisi lain, pasangan koalisi yang terdiri dari etnis Dayak dan Tionghoa berhasil memperoleh suara tertinggi di berbagai daerah, seperti di Singkawang dan Pontianak yang didominasi oleh etnis Tionghoa, serta di Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas

Hulu yang merupakan wilayah dengan populasi etnis Dayak yang signifikan. Merujuk pendapat Heywood (2016) bahwa politik identitas bertujuan untuk melawan dan menghilangkan penindasan dengan merombak identitas kelompok, yang pada akhirnya menghasilkan proses afirmasi diri dalam ranah politik dan budaya.

Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada Tahun 2018 diaktori oleh Sutarmidji merupakan kandidat dari etnis Melayu, menghadapi kompetisi politik yang kuat dengan Karolin Margaret Natasha. Dengan menerapkan strategi politik identitas yang lebih moderat, Sutarmidji berupaya mengkonsolidasikan dukungan dari suara Melayu sekaligus menarik simpati dari kelompok etnis lain. Begitu pun dengan Karolin menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan dominasi politik etnis Dayak di tengah meningkatnya pengaruh politik identitas Melayu yang diusung oleh lawannya, Sutarmidji. Dengan memanfaatkan warisan politik dari ayahnya, Cornelis yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur, Karolin berusaha untuk tampil sebagai penerus kepemimpinan Dayak yang dapat memastikan kelanjutan pembangunan di provinsi tersebut. Namun, Karolin juga harus menghadapi berbagai kritik mengenai politik dinasti dan tantangan dalam memperluas basis dukungan di luar komunitas Dayak. Dalam kampanyenya, Karolin banyak mengandalkan pendekatan identitas dengan melibatkan komunitas adat, jaringan keagamaan, serta elemen budaya lokal yang dianggap mampu menarik perhatian masyarakat.

5.1.1.a Sutarmidji – Ria Norsan dan Keterwakilan Etnis Melayu dalam Kampanye Politik

Sutarmidji dalam kampanyenya berupaya menciptakan narasi bahwa kepemimpinannya adalah untuk semua lapisan masyarakat, bukan hanya untuk satu kelompok tertentu. Dalam kampanyenya, Sutarmidji banyak menyoroti pengalaman dan keberhasilannya dalam membangun Kota Pontianak, yang menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pemilih lebih memilihnya dibandingkan lawan-lawannya. Strategi politik identitas yang digunakannya bersifat integratif dan tidak konfrontatif, sehingga dapat menarik dukungan dari berbagai latar belakang etnis dan agama di Kalimantan Barat (Lihat Lampiran 1 Temuan 1).

“Dalam proses kampanye, kami berdua tidak menggunakan isu konflik etnis dan semacamnya. Tetapi penggunaan identitas etnis itu tetap ada dan menyesuaikan di setiap daerah kami berkampanye karena populasi Kalimantan Barat adalah Melayu dan Dayak. Penggunaan agama pun itu memang sudah melekat dengan kebudayaan Melayu, karena Melayu dan Islam ini memang menjadi satu pasang dalam kesehariannya. Kami bersepakat dengan Ria Norsan dalam proses kampanye ingin berdemokrasi dengan baik tidak ada penggunaan politik uang dan sebagainya, kami ingin berjalan lurus apa adanya dan demokrasi pilkada yang sehat tanpa adanya konflik-konflik etnis (dikotomi etnis) pembelahan masyarakat karena masalah tersebut¹.”

Dari pernyataan tersebut bahwa kedua pasangan yakni Sutarmidji – Ria Norsan sangat menghindari politisasi etnis dalam proses Pilgub Tahun 2018 di Kalimantan Barat. Sehingga, proses kontestasi politik untuk menghindari penggunaan isu SARA (Suku, Agama, dan Ras) guna menghindari konfrontasi fisik dengan konstituen. Walaupun keduanya menyadari bahwa identitas etnis, seperti Melayu dan Dayak adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Kalimantan Barat, mereka memilih untuk tidak memanfaatkan perbedaan tersebut sebagai alat politik.

“Kami tidak melakukan upaya khusus dalam memobilisasi suara yang berdasarkan etnis-agama, semua bergerak secara alamiah saja dikalangan masyarakat dan saya membiarkan masyarakat semua menilainya dalam artian semua tetap ingin ada “Perubahan“. Dalam pilkada pun kami memastikan tidak adanya politik uang karena sekali lagi kami ingin pilkada berkualitas dan berintegritas. Tapi kalau memberikan APK (Alat Peraga Kampanye) seperti sarung dan penak itu saya memang memberikan kepada masyarakat.²”

Pilkada 2018, etnisitas menjadi faktor determinan dalam persaingan politik. Adanya pola perhitungan politik yang berlandaskan pada komposisi etnis, di mana komunitas Melayu mencari representasi politik setelah dua periode dipimpin oleh Cornelis dari etnis Dayak. Hubungan antara identitas etnis dan agama—di mana Melayu identik dengan Islam dan Dayak dengan Kristen/Katolik—berpengaruh pada pola pemungutan suara dalam Pilkada tersebut.

“Kompetisi politik di KalBar pada waktu itu menjadi etnis menjadi faktor determinan, terutama dengan daerah-daerah yang memiliki kompetitif tinggi misalkan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang yang

¹ Sutarmidji, Wawancara Pribadi, 7 Januari 2025.

² *Ibid.*

memiliki ketajaman lebih tinggi pada Pilgub yang menggambarkan komposisi persentase etnik. Pada Pilkada 2018 juga pun mejadi pembelajaran penting bagi etnik dan komunitas Melayu yang memiliki kekalahan dua periode dengan Cornelis sebelumnya.³ ”

Sutarmidji juga menggunakan pencapaiannya sebagai Wali Kota Pontianak sebagai isu utama dalam kampanyenya. Selama masa kepemimpinannya, Pontianak mengalami kemajuan yang signifikan dalam infrastruktur, pelayanan publik, dan pendidikan (Lihat Lampiran 1 Temuan 2). Dalam kampanyenya, dirinya membangun narasi bahwa dirinya adalah pemimpin yang telah terbukti mampu membawa perubahan, dan keberhasilannya di tingkat kota dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas di tingkat provinsi. Dengan mengangkat isu keberhasilan dalam reformasi birokrasi dan pembangunan ekonomi, ia berhasil menarik perhatian pemilih yang lebih pragmatis, termasuk dari kalangan non-Melayu dan Tionghoa.

“...seperti infrastruktur, pendidikan, dan banyak hal lainnya. Sehingga waktu itu isu yang dihembuskan adalah PERUBAHAN terutama untuk pemekaran provinsi baru yakni Kapuas Raya pada saat itu. Isu mengenai perubahan ini seperti percepatan pembangunan yang mana infrastruktur jalan itu 1.530km sehingga ada peningkatan dalam 5 tahun terakhir itu bisa menaikkan 30% dan setelah saya meninggalkan menjadi 79% kondisi infrastruktur jalan. Kemudian pembangunan sekolah-sekolah di daerah karena keterbatasan pendidikan sarana sekolah juga membebaskan biaya pendidikan SMA – SMK dan semuanya terwujud termasuk tata kelola pemerintahan. Selanjutnya juga status desa yang semula ada 667 atau 928 desa tertinggal dan masa akhir jabatan saya sudah tidak ada lagi desa tertinggal juga termasuk desa mandiri yang dari hanya 1 desa mandiri sekarang menjadi 1079. Hal ini juga termasuk dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) semula 1 Triliun sekarang menjadi sekitar 3,256 Triliun.⁴”

Oleh karena itu, Kesadaran akan keragaman etnis di Kalimantan Barat membentuk strategi kampanye Sutarmidji yang selektif. Dengan menghindari konfrontasi di daerah-daerah yang rentan konflik seperti Landak, fokus kampanye diarahkan pada penguatan basis dukungan yang sudah ada, sambil tetap menyampaikan pesan perubahan melalui narasi reformasi pemerintahan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

³ Jumadi, Wawancara Pribadi, 6 Januari 2025.

⁴ Sutarmidji, Wawancara Pribadi, 7 Januari 2025.

“Dalam kampanye pun, kami tidak melakukan di Kabupaten Landak jadi kami membiarkan saja atau lepaskan karena menghindari konfrontasi dengan masyarakat yang masih kental dengan etnis-agama.⁵”

Keberhasilan kampanye Sutarmidji tidak hanya bergantung pada daya tarik pribadinya, tetapi juga pada dukungan dari koalisi partai yang kuat. Dengan dukungan dari Golkar, Nasdem, Hanura, PKS, dan PKB, kampanye ini memanfaatkan jaringan politik yang luas untuk menggerakkan pemilih. Partai-partai ini memainkan peran krusial dalam menyebarkan pesan kampanye, mengorganisir kegiatan di tingkat akar rumput, dan mengonsolidasikan dukungan di dalam basis mereka masing-masing.

“Pada waktu 2018, koalisi partai bersifat tegas dalam mengusulkan pasangan cagubnya. Tetapi, waktu itu berdasarkan hasil survey saya memang nomor satu dalam kontestasi pilkada gubener hanya saja pasangan saya yakni Ria Norsan sempat memaksa untuk menjadi nomor satu alias gubernur walaupun memiliki elektabilitas dan popularitas yang kurang karena beliau (RN) merasa ketua partai besar sehingga memiliki sebanyak sembilan kursi dari Golkar dan PPP hanya tiga kursi saja waktu itu. Sehingga pada masa pendaftaran (RN) sempat ingin mengundurkan diri karena ingin tetap menjadi gubener sehingga melakukan mediasi ke KPU dan Panwaslu namun tetap tidak diperbolehkan dan mendapatkan sanksi pidana. Dengan demikian, kondisi waktu itu koalisi partai semua sepakat dan mau bekerjasama untuk gubener.⁶”

Koalisi yang terbentuk tidak secara langsung mengadopsi strategi mobilisasi yang berbasis etnis atau agama. Sebaliknya, mereka lebih menekankan pada keterlibatan politik yang terstruktur, dengan memanfaatkan tokoh lokal dan pemimpin masyarakat untuk membangun kepercayaan di kalangan pemilih. Dukungan dari partai-partai juga semakin memperkuat legitimasi kampanye, menambah kredibilitas terhadap janji perubahan yang diusung oleh Sutarmidji. Kekuatan organisasi koalisi ini memastikan pelaksanaan kampanye yang efektif di berbagai daerah, yang secara signifikan berkontribusi pada keberhasilan elektoral mereka. Adanya keterlibatan tokoh-tokoh lokal ini adalah salah bentuk upaya daripada tokoh lokal penting dalam memenangkan etnis Melayu untuk Sutarmidji – Ria Norsan.

⁵ Sutarmidji, Wawancara Pribadi, 7 Januari 2025.

⁶ *Ibid.*

“...Pada Pilkada 2018, meskipun MABM secara organisasi tidak secara resmi mendukung pasangan calon tertentu, beberapa tokoh penting MABM di tingkat kabupaten dan kota ikut terlibat dalam tim sukses pasangan Sutarmidji-Norsan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun secara struktural MABM tidak berafiliasi dengan partai politik, para individu yang berada di dalamnya tetap memiliki peran aktif dalam mempengaruhi arah politik masyarakat Melayu.⁷”

Keberadaan satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari etnis Melayu dimanfaatkan oleh komunitas Melayu untuk memaksimalkan dukungan bagi pasangan nomor 3. Berdasarkan sejarah Pilkada sebelumnya, komunitas etnis Melayu pada Pilkada 2018 bersatu untuk memenangkan pasangan nomor 3 yang mewakili etnis mereka. Hal serupa terjadi dengan komunitas etnis Melayu lainnya (Lihat Lampiran 1 Temuan 3) merasa terhubung secara etnis dengan pasangan nomor 3 dan memutuskan untuk memberikan dukungan kepada mereka lebih lanjut. Jumadi menerangkan sebagai berikut:

“Kita tahu bahwa partai-partai seperti Golkar, PKB, dan PKS itu lebih banyak mendekati pemilih berbasis agama dan etnis. Golkar dan PKB secara khusus mendekati tokoh-tokoh adat Melayu dan ulama untuk menarik simpati masyarakat. Partai-partai ini juga menggunakan jaringan pesantren, organisasi Islam, dan majelis taklim untuk membangun dukungan berbasis keagamaan. Maka dari itu, kampanye di wilayah mayoritas Melayu seperti Sambas, Pontianak, dan Kubu Raya lebih banyak menekankan narasi politik identitas. Para calon dan tim sukses melakukan pendekatan berbasis budaya, seperti menghadiri acara adat Melayu, festival budaya, dan pertemuan keagamaan. Mobilisasi suara Melayu lebih mudah dilakukan ketika ada tokoh dari komunitas Melayu yang masuk dalam jaringan politik partai-partai tersebut.⁸”

Identitas budaya merupakan proses di mana anggota suatu bangsa mengenali, menerima, dan menegaskan budaya kelompok mereka (Xiaomei, 2014). Dengan demikian, rasa keterikatan dan peningkatan kesadaran budaya dapat terwujud. Berbagai kebijakan yang dianggap meminggirkan komunitas etnis Melayu terus diingat dan mencapai puncaknya pada Pemilihan Gubernur 2018. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa perilaku pemilih dalam pemilihan dipengaruhi oleh karakteristik sosiologis, seperti kelas sosial utama, agama,

⁷ Jumadi, Wawancara Pribadi, 6 Januari 2025.

⁸ *Ibid.*

kelompok etnis, serta lokalitas dan bahasa yang digunakan oleh pemilih (Barrul, 2014).

Banyak penelitian telah mengungkapkan bahwa hubungan antara Islam dan Melayu sangat kuat dan sulit untuk dipisahkan. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama, tetapi juga sebagai ukuran nilai yang mendasari sikap dan perilaku masyarakat Melayu. Rasa kebanggaan yang mendalam terhadap identitas keislaman mereka terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, di mana tradisi dan praktik keagamaan sering kali menjadi bagian integral dari budaya Melayu. Misalnya, ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan Islam, mereka tidak hanya dianggap keluar dari agama, tetapi juga dianggap kehilangan identitas Melayu mereka. Sebaliknya, apabila individu yang mengaku sebagai Muslim terlepas dari latar belakang etnisnya akan diterima dan diakui sebagai bagian dari komunitas Melayu serta menunjukkan betapa dalamnya keterikatan antara identitas etnis dan keagamaan dalam masyarakat.

Pemilihan Gubernur 2018 dianggap sebagai kesempatan yang sangat strategis untuk menyatukan suara demi memenangkan pasangan nomor 3. Hal ini disebabkan oleh pengalaman dari Pilkada sebelumnya, di mana perolehan suara komunitas etnis Melayu terpecah antara beberapa pasangan etnis Melayu lainnya. Akibatnya, mereka mengalami kekalahan dalam pemilihan tahun 2007 dan 2012. Dengan menyatukan dukungan kali ini, komunitas Melayu berharap dapat menghindari kesalahan yang sama dan memastikan bahwa suara mereka tidak terbuang sia-sia, sehingga dapat mencapai kemenangan yang diinginkan.

Kampanye Sutarmidji secara strategis menggabungkan kedua aspek dengan fokus pada yakni kebijakan pragmatis dan mempertimbangkan pengaruh afiliasi etnis dan agama. Pelaksanaan dan perencanaan kampanye politik yang berakar pada rencana pembangunan yang konkret dan kerja sama koalisi yang efisien, menjadi peluang Sutarmidji dan Ria Norsan untuk mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai kelompok pemilih. Meskipun kampanye yang dilakukan tidak secara langsung memanfaatkan politik identitas, lanskap sosial-politik yang ada memastikan bahwa etnisitas dan agama tetap menjadi faktor yang berpengaruh. Koalisi partai dan dukungan komunitas melayu lainnya pun memainkan peran

dalam menentukan hasil pemilu, mencerminkan kompleksitas strategi kampanye modern di Indonesia. Temuan yang didapat dari integrasi wawancara dan data sekunder semakin memperjelas bahwa meskipun pembangunan menjadi titik fokus kampanye, identitas etnis tetap merupakan variabel yang signifikan.

5.1.1.b Karolin Margret Natasha – Suryadman Gidot dan Keterwakilan Etnis Dayak dalam Kampanye Politik

Karolin Margaret Natasha merupakan salah satu kandidat dalam Pilkada Kalimantan Barat 2018 yang menerapkan politik berbasis identitas dan satu-satunya kiprah sebagai perempuan dengan membawa warisan politik yang berat dari ayahnya yakni Cornelis yang telah menjabat sebagai gubernur selama dua periode. Di tengah meningkatnya dinamika politik identitas, terutama dengan munculnya narasi politisasi agama dan etnis Melayu yang diusung oleh lawan politik utamanya dari Sutarmidji – Ria Norsan, Karolin memilih untuk menekankan identitas etnis Dayak sebagai fondasi kampanyenya. Namun, strategi yang diambilnya tidak hanya berfokus pada retorika identitas, tetapi juga mencakup upaya untuk menjalin hubungan dengan berbagai komunitas dan memperluas dukungan di luar basis etnisnya.

Melalui kampanye politiknya, Karolin tidak hanya berusaha untuk mencapai posisi kekuasaan tetapi juga bertekad untuk melestarikan dan memperkuat representasi politik bagi masyarakat Dayak. Penggunaan narasi "Putra Daerah" sering kali menjadi simbol yang kuat dari identitas budaya dan etnis. Dalam konteks Etnis Dayak, Karolin muncul sebagai sosok yang menonjolkan komitmennya terhadap kepemimpinan yang berlandaskan pada komunitas adat dengan lebih lanjut menerangkan sebagai berikut:

“Jadi setiap pemilu itu harapan dan preferensi masyarakat berbeda. Namun, dalam pilkada berbedanya adalah nuansa kedaerahan lebih kuat dan ada isu Putra Daerah, etnis, agama dan kental. Kalau Pilgub dan Pilbup pun juga berbeda permasalahannya, kalau Pilpub lebih kental konflik horizontalnya daripada gubernur⁹. ”

⁹ Karolin Margret Natasha, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

Sarat penggunaan identitas Dayak menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi kampanye Karolin. Dengan dukungan dari berbagai organisasi adat seperti Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak, Karolin berupaya menarik dukungan dengan menekankan pentingnya mempertahankan kepemimpinan etnis Dayak. Selain itu, kampanye berbasis komunitas dilakukan dengan pendekatan kultural, termasuk menghadiri acara adat dan pertemuan masyarakat (Lihat Lampiran 1 Temuan 4). Meskipun strategi ini berhasil memperkuat dukungan di kalangan basis Dayak, dampaknya terhadap pemilih di luar komunitas tersebut masih perlu diketahui lebih lanjut seperti pemilih dari pasangan Milton Crosby dan Boyman Harun yang berasal dari Etnik Dayak-Melayu maupun daerah lainnya (Lihat Lampiran 1 Temuan 5).

“...Jadi agak sulit kalau apakah orang Dayak milih orang Dayak dan Katolik milih orang Katolik. Jadi semua berdasarkan segmentasi kepartaian karena itu menjadi dasar utama dalam melihat peluang dan basis. ... Jadi saya menggunakan segmentasi partai karena melihat basis pemilih. Dari awal pemetaan politik adalah kepartaian jadi menargetkan suara di basis-basis kita dan berharap bisa mengambil alih suara dari basis-basis partai lain. Kalau untuk segmentasi etnis, agama, suku juga ada tapi tidak terlalu signifikan¹⁰. ”

Keterlibatan organisasi adat Dayak, seperti Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), secara aktif mendukung pencalonan Karolin sehingga memperkuat narasi ini. Selain itu, kampanye ini menggambarkan Karolin sebagai representasi dari keberlanjutan kepemimpinan Dayak dalam politik lokal.

“Hal lainnya pun dukungan dari berbagai organisasi sosial ya seperti Institut Dayakologi dan Dewan Adat Dayak juga berperan penting dalam mobilisasi suara. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai jembatan antara pemimpin politik dan masyarakat, memperkuat solidaritas etnis dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat Dayak. Jadi kesadaran etnis menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan politik. ¹¹”

Penelitian serupa lainnya (Tisca, 2010; Achmad, 2012) berpendapat bahwa pola kemenangan etnik Dayak Cornelis pada Tahun 2007 dan 2012 bahwa Dewan Adat Dayak (DAD) dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh kepada pasangan Cornelis dan Christiandy Sanjaya.

¹⁰ Karolin Margret Natasha, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

¹¹ Cornelis, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

Seluruh pengurus DAD sepakat untuk mendukung pasangan ini dan mengekspresikan komitmen mereka dalam sebuah dokumen yang ditandatangani. Dokumen tersebut kemudian disebar ke seluruh masyarakat Dayak sebagai ajakan untuk memberikan dukungan kepada pasangan Cornelis dan Christiandy Sanjaya. Studi yang dilakukan oleh Tisca dan Ahmad sejalan dengan pelaksanaan kampanye berbasis identitas etnis.

“Ya, jadi memanfaatkan isu kebangkitan etnis Dayak ini sebagai upaya untuk menarik dukungan. Dalam kampanyenya, menekankan pentingnya mengangkat kembali posisi etnis Dayak yang selama ini terpinggirkan. Dengan isu „anak daerah,“ kami bisa membangun narasi yang resonan di kalangan pemilih Dayak. Jadi kami memberikan afirmasi kepada komunitas Dayak, yang selama ini merasa terabaikan, dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan mereka di pemerintahan¹². ”

Pada aspek lainnya, persaingan dengan pasangan Sutarmidji-Ria Norsan semakin menegaskan dan memperkuat perbedaan politik identitas yang muncul dalam Pilkada 2018. Dengan dukungan yang kuat dari komunitas Melayu dan Muslim, lawan Karolin berhasil mengonsolidasikan suara mereka dengan memposisikan diri sebagai pilihan yang lebih mewakili kepentingan mayoritas pemilih di Kalimantan Barat. Kampanye yang menekankan sentimen identitas Melayu dan Islam semakin diperkuat setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menunjukkan bahwa strategi berbasis identitas dapat memberikan dampak signifikan dalam meraih dukungan pemilih.

“Pada waktu kampanye Pilkada khususnya Gubernur pada Tahun 2018, persis setelah pemilihan Gubernur DKI dimana nuansa keislaman sedang tinggi dan FPI sedang naik daun. Jadi waktu itu suasana pilgub diwarnai dengan Agama. Jadi penggunaan SARA (Suku, Agama, dan Ras) tidak tentu dan tidak juga menjadi faktor penentu dan tergantung isu besarnya di Indonesia. Jadi, etnisitas tentu akan ada terus dalam suasana itu setiap Pilkada kental dan sarat dengan nuansa kedaerahan.¹³ ”

Momen ini terjadi setelah pemilihan Gubernur DKI sebelumnya yang mana Front Pembela Islam (FPI) mulai menarik perhatian yang lebih besar dari masyarakat. Dalam permasalahannya, agama menjadi salah satu faktor yang sangat

¹² Cornelis, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

¹³ Karolin Margret Natasha, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

mempengaruhi dinamika politik untuk menciptakan suasana isu-isu keagamaan mendominasi diskusi publik.

“...Saya dan Gidot jadi pada saat itu memang situasinya tidak menguntungkan dan isu besarnya adalah “Islam harus merebut kembali Kalimantan Barat (Non-Islam ke Islam) ataupun Saatnya Islam kembali memimpin kembali Islam”¹⁴. ”

“...Namun, waktu itu isunya kan memang kental dengan Agama Islam ya kasarnya “Perempuan tidak boleh memimpin” ditambah dari dukungan FPI untuk memobilisasi narasi tersebut.¹⁵”

Merujuk pada pemberitaan media Tribunnews (2016) bahwa politik identitas di Kalimantan Barat semakin memanas setelah pemilihan gubernur Jakarta 2017 dan kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Pada 4 November 2016, bersamaan dengan demonstrasi anti-Ahok yang pertama di Jakarta, sekelompok besar pengunjung rasa, banyak di antaranya mengaku terafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk berkumpul di kawasan “Chinatown” Kota Pontianak tepatnya di Jalan Gajah Mada untuk mengadakan protes solidaritas yang menuntut agar Ahok dipenjara karena tuduhan penistaan agama .

Menurut laporan IPAC (Institute For Policy Analysis of Conflict) pada Tahun 2018, salah satu fakta yang mencolok mengenai keterlibatan ulama dalam politik dan penggunaan simbol-simbol keagamaan, seperti masjid, terlihat dalam kontestasi Gubernur Jakarta pada tahun 2016. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah ulama termasuk Habieb Rizieq Shihab, Bahctiar Nashir, dan tokoh nasional lainnya, berperan aktif dalam mengorganisir gerakan politik yang cukup besar melalui aksi damai 212 yang menantang calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama. Fakta ini mencerminkan kegerahan keagamaan di satu sisi, tetapi di sisi lain juga merupakan bagian dari fenomena politik yang lebih luas. Konteks pemilihan kepala daerah saat itu mempertemukan calon Muslim dengan calon non-Muslim, yang berujung pada pernyataan politik yang menyerukan pemilih untuk memilih calon Muslim dan menolak penista agama, sebuah dimensi politik yang tidak dapat diabaikan.

¹⁴ Karolin Margret Natasha, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

¹⁵ Cornelis, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

Keberhasilan kehadiran ulama dalam kontestasi Pilkada Jakarta telah memberikan warna baru dalam dinamika suksesi politik di Indonesia yang kemungkinan akan diadopsi oleh berbagai suksesi politik di daerah lain, termasuk dalam Pilkada 2018 di Kalimantan Barat. Namun, pola adaptasi ini akan mengungkap fakta-fakta baru yang mungkin berbeda dari situasi di Jakarta yang sangat berkaitan dengan berbagai masalah fenomena problematis terkait dengan artikulasi politik. Pembicaraan mengenai gagasan persatuan umat Islam di Kalimantan Barat diperkirakan akan semakin menguat saat membahas aspirasi umat Islam dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang melibatkan elit agama serta berbagai kegiatan di beberapa masjid di daerah-daerah. Di sisi lain, keberhasilan yang dicapai di Jakarta akan menjadi contoh bagi elit agama dalam membentuk preferensi politik umat Islam di Kalimantan Barat. Penggunaan SARA yang merujuk pada Suku, Agama, dan Ras, menjadi elemen yang tidak dapat dihindari dalam kampanye tersebut. Namun, menariknya adalah bahwa penggunaan SARA ini tidak selalu konsisten dalam penerapannya serta tergantung pada isu-isu besar yang berkembang di Indonesia pada saat itu. Dalam beberapa situasi, identitas agama dan etnisitas digunakan untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu sementara di lain waktu, hal tersebut bisa diabaikan jika tidak relevan dengan isu yang sedang hangat.

Dalam konteks politik Indonesia, hubungan antara keluarga dan kekuasaan sering kali menjadi faktor penentu dalam membangun citra politik seorang individu seperti adanya hubungan antara Cornelis seorang tokoh politik yang berpengaruh dan putrinya Karolin. Cornelis tidak hanya berperan sebagai ayah, tetapi juga sebagai mentor dan pendorong utama dalam membentuk citra politik Karolin, terutama dalam konteks dukungan dari komunitas Dayak. Dukungan yang diraihinya dari komunitas ini menjadi modal politik yang sangat berharga bagi Karolin. Studi lainnya juga diteliti oleh Dewi (2022) mengenai bahwa Karolin cenderung berperan sebagai *proxy* dinasti politik yang didorong oleh kesadaran identitas etnis Dayak dan memanfaatkan sentimen marwah partai, khususnya PDI Perjuangan yang merupakan afiliasi partai politiknya dengan basis tradisional di daerah tersebut. Bukti lain yang mendukung hal ini terlihat dari motivasi Karolin untuk terlibat dalam kontestasi Gubernur Kalbar 2018, di mana ia menyebutkan tiga

alasan utama. *Pertama*, adanya percaya bahwa dengan menjabat sebagai Bupati dan kemudian Gubernur, ia dapat lebih mendekati diri kepada masyarakat dan memahami kebutuhan mereka. *Kedua*, merasa bahwa posisinya akan memberinya kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan etnis Dayak di tingkat yang lebih tinggi. *Ketiga*, Karolin ingin melanjutkan warisan politik ayahnya, Cornelis dan memastikan bahwa visi serta program yang telah dibangun sebelumnya tetap berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Dayak.

Dalam hal ini, ia memanfaatkan latar belakang keluarganya untuk memperkuat posisinya di dunia politik. Dengan menghubungkan dirinya dengan warisan dan prestasi ayahnya, Karolin dapat menarik perhatian serta dukungan dari pemilih yang memiliki keterikatan emosional dan kultural dengan Cornelis dengan lanjut menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya, peran dan pengaruh dari Bapak Cornelis ada dan saja tidak cukup ya, karena kita membicarakan modalitas sosial termasuk modalitas politik juga pada saat Pilkada 2018. Jadi nama besar beliau ada untung dan tidak untungnya, ruginya adalah yang namanya sudah menjabat selama 2 (dua) periode jadi lawan politik pasti ada¹⁶.”

Keberadaan Cornelis juga menjadi rintangan bagi Karolin karena adanya kritik mengenai praktik politik dinasti. Banyak pemilih yang melihat Karolin sebagai penerus Cornelis tanpa menawarkan perubahan yang berarti. Selain itu, dominasi narasi politik identitas juga menghalangi usahanya untuk menarik dukungan dari komunitas non-Dayak. Merujuk pada pendapat Cornelis (dalam Putra, 2024: 37) dengan tegas bahwa:

“Kami tidak membangun dinasti politik. Kami menjalankan politik dengan santun, mengikuti proses yang ada dan berlaku secara hukum dan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengubah konstitusi. Anak-anak serta menantu saya terjun ke dunia politik melalui proses rekrutmen dan seleksi yang jelas dan sah¹⁷. ”

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Karolin mencerminkan kompleksitas politik lokal yang dipengaruhi oleh sejarah, identitas, dan persepsi masyarakat. Agar berhasil, Karolin perlu membedakan dirinya dari Cornelis dan

¹⁶ Karolin Margret Natasha, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

¹⁷ Cornelis, sebagaimana dikutip dalam Sareb Putra, *Biografi Politik Karolin Margret Natasha* (Tangerang: Lembaga Literasi Dayak, 2024), hlm 45.

menyajikan visi yang jelas serta relevan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas non-Dayak. Langkah ini sangat penting untuk membangun dukungan yang lebih luas dan mengatasi stigma yang ada.

5.1.2 Peranan Media dalam Kampanye

Menurut Koike (2002) Media dapat dianggap sebagai arena di mana berbagai kekuatan yang saling bertentangan berinteraksi dalam masyarakat modern, sehingga menciptakan tingkat kompleksitas isu yang tinggi. Hubungan antara pemerintah, media, dan politik, serta interaksi media dengan isu globalisasi dan lokalitas, menjadi dua aspek yang kontroversial dalam studi media secara umum. Penggunaan media sosial mendorong siapa saja yang tertarik untuk ikut serta dengan memberikan kontribusi dan tanggapan secara terbuka, memberikan komentar, serta membagikan informasi dengan cepat dan tanpa batasan (Kaplan et al., 2010). Pada bidang politik seringkali, media sosial dijadikan sebagai *platform* untuk kampanye politik, memungkinkan penyebaran informasi yang lebih efisien dan luas.

5.1.2.a Peranan Media dalam Kampanye Politik Sutarmidji – Ria Norsan

Kemenangan Sutarmidji-Ria Norsan dengan raihan 51,55% suara mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi kampanye mereka yang terpadu. Pesan pembangunan infrastruktur dan pendidikan disampaikan secara efektif melalui berbagai platform kepada seluruh segmen pemilih, menghasilkan peningkatan kepercayaan publik dan dukungan yang signifikan.

“Saya dan Wakil saya dengan tim kampanye serta dukungan partai pengusung serta tokoh masyarakat. Sehingga kampanye berfokus pada program konkret, seperti percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses layanan kesehatan yang lebih baik. Dalam setiap pertemuan, Saya dan Ria Norsan selalu membawa data nyata mengenai kondisi jalan, sekolah, serta rumah sakit, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang telah dan akan dikerjakan. ...Sehingga upaya kami dalam memobilisasi suara adalah penyampaian program kampanye seperti beasiswa untuk 5.000 s.d 10.000 mahasiswa untuk kuliah sehingga masyarakat lebih memilih siapa yang beri 20.000 s.d 200.000. ¹⁸”

¹⁸ Sutarmidji, Wawancara Pribadi, 7 Januari 2025.

Strategi komunikasi kedua pasangan (Sutarmijdi – Ria Norsan) disesuaikan dengan dinamika sosial-politik yang terjadi di Kalimantan Barat. Meskipun tetap menekankan pentingnya pembangunan, mereka dengan hati-hati mengakui keberadaan politik identitas tanpa mengungkapkannya secara langsung. Dengan menggabungkan metode kampanye tradisional dan pendekatan digital yang modern, mereka berhasil menyampaikan agenda mereka secara efektif kepada masyarakat luas. Materi kampanye mereka sering kali menyoroti pencapaian konkret, seperti pembangunan jalan baru, pendanaan pendidikan, dan kemajuan ekonomi, yang semakin memperkuat citra mereka sebagai pemimpin pragmatis yang berkomitmen pada pembangunan daerah.

“Namun, kami tetap mengkombinasikan kampanye tatap muka dan penggunaan media sosial. Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarluaskan program, menangkal berita hoaks, dan membangun citra positif. Sementara kampanye langsung tetap menjadi alat utama untuk menjangkau pemilih di daerah terpencil. ...Audiens kami sendiri adalah masyarakat Kalimantan Barat yang heterogen, dengan berbagai latar belakang etnis, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Dampaknya yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap program kerja yang ditawarkan, yang berujung pada tingginya elektabilitas dan kemenangan di Pilkada 2018¹⁹.”

Selain itu pun kampanye pasangan Sutarmidji-Norsan memanfaatkan narasi persatuan Melayu sebagai alat politik. Mereka menekankan pentingnya etnis Melayu untuk kembali memegang kepemimpinan di tingkat provinsi. Selain itu, penggunaan Islam sebagai elemen penguat secara tidak langsung memperluas basis dukungan, dengan kelompok Muslim dari etnis Bugis dan Madura juga memberikan dukungan kepada Sutarmidji dengan lebih lanjut berpendapat:

“Pilkda 2018 di Kalimantan Barat tidak sekadar menjadi pertarungan program kerja antar pasangan calon, tetapi juga menjadi panggung utama bagi politik identitas. Dalam konteks komunikasi politik, identitas etnis dan agama menjadi dua faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku pemilih.²⁰”

Penggunaan beberapa pendekatan spesifik yang digunakan dalam kampanye pasangan Sutarmidji-Norsan untuk memperkuat dukungan berbasis identitas:

¹⁹ Sutarmidji, Wawancara Pribadi, 7 Januari 2025.

²⁰ Jumadi, Wawancara Pribadi, 6 Januari 2025.

1. Narasi Kesatuan Melayu

Kampanye menekankan pentingnya kesatuan Melayu untuk kembali memiliki pemimpin di tingkat provinsi setelah sebelumnya dikuasai oleh pemimpin dari etnis lain serta “Pemilih Melayu” diyakinkan bahwa hanya dengan memilih pemimpin dari etnis mereka, kepentingan dan budaya Melayu dapat terjaga.

2. Identifikasi Islam sebagai Faktor Determinan/Penguat

Pasangan Sutarmidji-Norsan secara tidak langsung digambarkan sebagai representasi Islam yang lebih kuat dibandingkan lawannya sehingga kelompok-kelompok Muslim lain seperti Bugis dan Madura ikut memberikan dukungan, memperluas basis suara pasangan ini. Penelitian serupa lainnya juga diperkuat oleh Hasse (2021) bahwa masyarakat Melayu sebagian besar adalah Muslim sehingga identitas Melayu sering diasosiasikan dengan Islam, dan sebaliknya. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan, terlihat dalam praktik sosial yang menggabungkan budaya Melayu dan Islam. Fenomena ini juga dapat ditemukan di berbagai daerah, termasuk di tanah Bugis.

3. Penggunaan Media sebagai Memperkuat Sentimen Komunal

Penggunaan media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan pesan-pesan berbasis identitas yang mana munculnya banyak narasi yang berkembang bukan soal program kerja, melainkan soal "perjuangan Melayu dan Islam" dalam Pilkada 2018.

Kemenangan Sutarmidji-Ria Norsan dalam Pilkada 2018 mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi kampanye yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika sosial-politik di Kalimantan Barat. Pasangan ini berhasil menyampaikan pesan-pesan mengenai pembangunan infrastruktur dan pendidikan secara efektif melalui berbagai platform, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga berhasil menggalang dukungan yang signifikan dari masyarakat. Dalam setiap kesempatan, Sutarmidji dan Ria Norsan bersama tim kampanye serta dukungan dari partai pengusung dan tokoh masyarakat, selalu menekankan program-program konkret. Keduanya menyajikan data dan fakta mengenai kondisi jalan, sekolah, dan rumah sakit, memberikan gambaran yang jelas

kepada masyarakat tentang apa yang telah dan akan mereka lakukan. Dengan pendekatan ini, Sutarmidji – Ria Norsan berhasil memobilisasi suara dengan menawarkan program beasiswa untuk 5.000 hingga 10.000 mahasiswa.

Kampanye yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada program kerja, tetapi juga memanfaatkan narasi persatuan Melayu sebagai alat politik. Adanya penekanan pentingnya etnis Melayu untuk kembali memegang kepemimpinan di tingkat provinsi, meyakinkan pemilih bahwa hanya dengan memilih pemimpin dari etnis mereka, kepentingan dan budaya Melayu dapat terjaga. Selain itu, identifikasi Islam sebagai faktor penguat juga menjadi isu penting, di mana pasangan ini digambarkan sebagai representasi Islam yang lebih kuat dan mampu memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan umat.

Pemanfaatan media sosial sebagai alat utama untuk menyebarkan pesan-pesan berbasis identitas juga menjadi fokus perhatian. Narasi yang berkembang tidak hanya menekankan program kerja, tetapi lebih kepada "perjuangan Melayu dan Islam" dalam konteks Pilkada 2018. Dengan cara ini, kampanye Sutarmidji-Ria Norsan tidak hanya berfungsi sebagai pertarungan program kerja, tetapi juga sebagai arena utama bagi politik identitas yang berpengaruh besar terhadap perilaku pemilih.

5.1.2.b Peranan Media dalam Kampanye Politik Karolin Margret Natasha – Suryadman Gidot

Kampanye politik yang Karolin – Gidot dilaksanakan oleh tim sukses, partai pengusung, dan berbagai organisasi masyarakat, termasuk komunitas Dayak yang berfokus pada program-program kerja yang mendukung pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Kalimantan Barat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, serta meningkatkan usaha produktif yang berbasis pada pengelolaan sumber daya lokal dengan lanjut Karolin menjelaskan:

“Jadi kami dengan tim kampanye serta dukungan partai pengusung maupun organisasi Dayak lainnya yang mana kampanye berfokus pada program kerja aja, seperti Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

baru di seluruh wilayah kabupaten/kota, melanjutkan program pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat., meningkatkan usaha produktif bidang pengelolaan SDA dan pengembangan green economy yang berkelanjutan, jadi semua mengarah ke Pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata dengan kemandiannya. Maka dari itu, kami menggunakan media sosial juga untuk informasi mengenai kami berdua.²¹“

Kampanye yang dilakukan oleh partai pengusung dan organisasi Dayak berperan penting dalam mendukung visi dan program pasangan calon. Para komunikator ini memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang jelas, terstruktur, dan meyakinkan kepada masyarakat. Sangat penting untuk menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam kampanye berfungsi sebagai agen komunikasi yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan selaras dengan visi dan misi pasangan calon. Sehingga, pesan yang disampaikan dalam kampanye ini terfokus pada program-program kerja yang nyata dan akan diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat. Program-program ini mencakup pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi yang menjadi prioritas. Selain itu, kampanye ini juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang dapat mendukung mobilitas masyarakat.

Namun, pada penggunaan media saat itu tidaklah masif. Penyebaran informasi melalui media sosial hanyalah bersifat normatif untuk pengenalan Karolin – Gidot berbeda dengan penggunaan media konvensional seperti televisi, koran, dan sebagainya.

“Media Sosial pada 2018 baru digunakan, jadi digunakan sebagai popularitas dan elektabilitas jadi hanya normatif untuk program dan memperkenalkan diri serta tidak terlalu menggunakan untuk penggiringan opini.²²”

Sehingga sasaran utama kampanye ini adalah masyarakat di Kalimantan Barat, dengan mempertimbangkan segmentasi berdasarkan etnis, agama, dan suku. Hal ini menunjukkan bahwa audiens yang ingin dijangkau memiliki keberagaman

²¹ Karolin Margret Natasha, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

²² *Ibid.*

budaya dan sosial, yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus bersifat inklusif dan mampu merangkul semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang mereka. Kampanye ini bertujuan untuk menyampaikan pesan yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi setiap kelompok dalam masyarakat.

“Media sosial juga berperan penting dalam mempengaruhi hasil Pilkada 2018. Karolin dan tim kampanyenya memanfaatkan platform ini untuk membangun narasi yang mendukung. Dengan menggunakan media sosial, mereka dapat menjangkau pemilih yang lebih luas sehingga interaksi langsung dengan masyarakat melalui media sosial membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan partisipasi pemilih²³.”

Dampak yang diharapkan dari strategi kampanye ini adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai program-program kerja yang ditawarkan. Selain itu, diharapkan juga adanya peningkatan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon yang diusung. Melalui penyampaian pesan yang efektif dan penggunaan media sosial sebagai saluran utama, kampanye ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan pasangan calon dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

5.2 Dampak Politik Identitas Pada Pergeseran Suara

5.2.1 Dinamika Pergeseran Suara Berdasarkan Etnisitas

Kalimantan Barat memiliki keragaman etnis yang signifikan, dengan kelompok Dayak sebagai penduduk asli dan kelompok etnis lain seperti Melayu, Tionghoa, dan Madura yang membentuk masyarakat multikultural. Hubungan primordialisme membantu menjelaskan bagaimana identitas etnis yang kuat ini mempengaruhi pilihan politik. Primordialisme menekankan ikatan emosional dan loyalitas yang mendalam terhadap kelompok etnis seseorang, yang seringkali diwariskan secara turun-temurun. Ikatan ini melampaui pertimbangan rasional semata, seperti program kerja kandidat, dan dapat menjadi pendorong utama dalam menentukan pilihan suara. Di Kalimantan Barat, identitas etnis seringkali dikaitkan dengan sejarah, budaya, dan akses terhadap sumber daya menciptakan dinamika

²³ Cornelis, Wawancara Pribadi, 9 Januari 2025.

politik yang kompleks. Sentimen etnis ini dapat memperkuat solidaritas internal dalam suatu kelompok, namun juga dapat memicu persaingan dan konflik dengan kelompok etnis lain.

Hadirnya desentralisasi yang diimplementasikan pasca-reformasi 1998, telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini menciptakan ruang bagi kelompok etnis untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik lokal. Di Kalimantan Barat, desentralisasi telah memungkinkan kelompok etnis, khususnya Dayak, untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi mereka melalui jalur politik formal. Kelompok Dayak, misalnya, telah beradaptasi dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengajukan kandidat dari kalangan mereka sendiri dalam pemilihan lokal, serta membentuk aliansi strategis dengan kelompok etnis lain untuk memperkuat posisi mereka. Namun, desentralisasi juga menciptakan tantangan baru. Pengalihan kekuasaan ke tingkat daerah dapat memperkuat identitas etnis lokal, tetapi juga dapat memicu persaingan antar kelompok etnis untuk mengendalikan sumber daya dan kekuasaan di tingkat lokal. Akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan kesempatan politik dapat memperburuk ketimpangan dan meningkatkan potensi konflik. Misalnya, dalam beberapa kasus, kelompok etnis minoritas merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar etnis.

Interaksi antara primordialisme dan desentralisasi terlihat jelas dalam Pilkada Kalimantan Barat. Pilkada-pilkada sebelumnya telah menunjukkan bagaimana identitas etnis menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pemilihan. Sebagai contoh, kemenangan Cornelis seorang kandidat dari etnis Dayak, dalam beberapa Pilkada sebelumnya, dapat diinterpretasikan sebagai bukti kekuatan primordialisme dalam politik lokal. Kemenangannya sering dikaitkan dengan dukungan kuat dari kelompok etnis Dayak yang merasa terwakili olehnya. Namun, Pilkada 2018 menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Dalam Pilkada 2018, Sutarmidji berhasil meraih dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk pemilih dari etnis Dayak, yang menunjukkan bahwa meskipun identitas etnis tetap berpengaruh, faktor-faktor lain seperti visi dan misi yang jelas, serta kemampuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat juga sangat menentukan.

Selain itu, strategi kampanye dengan penggunaan media sosial untuk menjangkau pemilih menjadi kunci keberhasilan Sutarmidji. Hal ini menunjukkan bahwa dalam paham desentralisasi, di mana identitas etnis masih relevan ada sebuah kebutuhan untuk mengedepankan isu-isu yang lebih universal dan inklusif agar dapat menarik dukungan dari berbagai kelompok etnis.

Politisasi etnis dalam penggunaannya mencakup berbagai aspek, termasuk etnisitas, agama, dan faktor sosial lainnya. Dalam Pilkada Kalimantan Barat, strategi kampanye seringkali memanfaatkan identitas etnis dan agama untuk memobilisasi dukungan. Para kandidat menggunakan simbol-simbol dan retorika yang mengacu pada identitas etnis dan agama tertentu untuk menarik pemilih dari kelompok yang sama. Misalnya, dalam Pilkada 2018 beberapa kandidat menekankan latar belakang etnis mereka dalam kampanye untuk membangun koneksi emosional dengan pemilih. Penggunaan media sosial juga semakin intensif dalam menyebarkan pesan-pesan politik yang bermuatan identitas. Hal ini dapat memperkuat polarisasi politik dan menciptakan persaingan yang tajam antar kelompok. Dengan demikian, penting untuk menganalisis siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, di mana dan kapan hal itu terjadi, mengapa hal ini penting, dan bagaimana dampaknya terhadap pemilih dan stabilitas politik.

Dampak penggunaan politik identitas dalam Pilkada Kalimantan Barat terhadap stabilitas politik dapat dijelaskan dengan merangkum beberapa aspek penting. *Pertama*, penggunaan politik identitas dapat memperkuat partisipasi politik dan representasi kelompok etnis tertentu, tetapi di sisi lain hal ini juga dapat memicu konflik dan polarisasi sosial. *Kedua*, Kelompok etnis yang terlibat dalam Pilkada, seperti Dayak, Melayu, Tionghoa, dan Madura, serta para kandidat yang memanfaatkan identitas etnis dalam kampanye mereka, berperan penting dalam dinamika ini. Proses ini terjadi di Kalimantan Barat, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, dan berlangsung selama periode pemilihan, termasuk Pilkada 2007, 2012, dan 2018. Persaingan antar kelompok etnis untuk mendapatkan kekuasaan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan menghambat pembangunan daerah.

Kehadiran dari eksistensi komunitas-komunitas Melayu saat itu terjadi adanya sebuah kesepakatan yang dijalin oleh organisasi untuk menjadi bagian penting dalam upaya memenangkan salah satu kader atau anggota dalam pertarungan politik. Pada pemilihan umum 2007 dan 2012, keputusan pencalonan yang dihasilkan oleh organisasi suku justru mengarah pada pembagian suara yang tidak menguntungkan bagi calon gubernur dan wakil gubernur dari etnis Melayu, sehingga perolehan suara dari kelompok ini menjadi tidak optimal. Namun, dalam pemilihan 2018, para tokoh etnis Melayu akhirnya sepakat untuk mengajukan satu calon saja guna menghindari perpecahan yang dapat merugikan mereka (Lampiran 1 Temuan 6).

Perubahan pilihan politik di Kalimantan Barat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara primordialisme, desentralisasi, dan politik identitas. Identitas etnis yang kuat, yang ditekankan oleh primordialisme, berinteraksi dengan kesempatan partisipasi politik yang diberikan oleh desentralisasi, membentuk pilihan politik individu dan kelompok. Primordialisme tidak hanya berfungsi sebagai pengikat sosial, tetapi juga sebagai pendorong motivasi politik yang mendalam. Identitas etnis yang kuat sering kali menjadi landasan bagi individu untuk memilih kandidat atau partai yang dianggap mewakili kepentingan kelompok mereka. Hal ini terlihat jelas dalam pemilihan kepala daerah, di mana kandidat dari kelompok etnis tertentu sering kali mendapatkan dukungan yang signifikan dari pemilih yang memiliki latar belakang etnis yang sama.

Meskipun identitas etnis seringkali mempengaruhi pilihan politik, desentralisasi memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari berbagai kelompok etnis. Proses desentralisasi yang diimplementasikan di Indonesia pasca-reformasi memberikan ruang bagi kelompok etnis untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam politik lokal. Namun, hal ini juga dapat memicu persaingan dan konflik antar kelompok. Ketika kelompok etnis merasa terancam oleh dominasi kelompok lain dalam pengambilan keputusan politik, ketegangan dapat meningkat, yang berpotensi mengarah pada konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana interaksi antara primordialisme dan desentralisasi dapat menciptakan dinamika politik yang kompleks di Kalimantan Barat.

5.2.2 Perubahan Perilaku Pemilih

Politik identitas merujuk pada cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan atribut sosial tertentu, seperti etnisitas, ras, agama, atau gender. Dalam konteks politik berbasis etnis, identitas etnis menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan sistem politik. Identitas etnis tidak hanya membentuk persepsi individu terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap orang lain dan institusi politik. Identitas etnis dapat menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota kelompok, yang sering kali mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang mendukung kepentingan kelompok mereka. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, individu dari kelompok etnis tertentu mungkin lebih cenderung untuk memilih kandidat yang berasal dari kelompok yang sama, karena mereka merasa bahwa kandidat tersebut lebih memahami dan mewakili kebutuhan serta aspirasi mereka. Selain itu, identitas etnis juga dapat mempengaruhi interaksi sosial di luar konteks politik, di mana individu mungkin lebih memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang etnis yang sama, sehingga memperkuat jaringan sosial yang ada.

Identitas etnis dapat mempengaruhi persepsi pemilih dalam beberapa cara. *Pertama*, individu cenderung memiliki preferensi politik yang sejalan dengan kelompok etnis mereka. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan umum di mana kandidat dari kelompok etnis tertentu sering kali mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemilih yang memiliki identitas etnis yang sama. *Kedua*, identitas etnis dapat mempengaruhi cara individu menilai isu-isu politik. Misalnya, pemilih dari kelompok etnis minoritas mungkin lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi atau ketidakadilan sosial.

Pada pemilihan baik umum dan daerah, politik berbasis etnis sering kali menciptakan polarisasi di antara kelompok-kelompok etnis. Ketika kandidat atau partai politik mengadopsi strategi yang berfokus pada identitas etnis, hal ini dapat memperkuat perasaan solidaritas di dalam kelompok etnis tersebut. Misalnya, dalam Pilkada 2018 kandidat menggunakan simbol-simbol etnis dan retorika yang menekankan perbedaan identitas untuk menarik dukungan dari pemilih yang

memiliki latar belakang etnis yang sama. Strategi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih dari kelompok etnis tersebut, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan dengan kelompok etnis lawan politik yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui. Ketegangan ini sering kali muncul dalam bentuk konflik sosial atau perdebatan publik yang tajam, di mana masing-masing kelompok etnis berusaha untuk mempertahankan posisi dan kepentingan mereka. Polarisasi ini dapat mempengaruhi keputusan pemilih, di mana individu lebih cenderung memilih kandidat yang dianggap mewakili kepentingan etnis mereka.

Identitas etnis dan komunikasi politik saling berinteraksi dalam membentuk perilaku pemilih. Ketika individu merasa terhubung dengan identitas etnis mereka, mereka lebih cenderung terlibat dalam komunikasi politik yang relevan dengan kelompok etnis mereka. Interaksi ini menciptakan ruang bagi mobilisasi politik yang lebih besar di dalam kelompok etnis, di mana individu merasa bahwa suara mereka lebih didengar dan diperhitungkan. Saat Pilgub di Tahun 2018, banyak pemilih yang terlibat dalam diskusi politik di komunitas mereka, berbagi informasi tentang kandidat yang dianggap mewakili kepentingan etnis mereka, dan berpartisipasi dalam kampanye yang menekankan identitas etnis. Hal ini menunjukkan bahwa keterhubungan dengan identitas etnis tidak hanya mempengaruhi preferensi pemilih, tetapi juga mendorong mereka untuk aktif dalam proses politik.

